



JURNAL FAIRNESS

ISSN (print): 2303-0348;
ISSN (online): 2303-0372

Available online at <https://ejournal.unib.ac.id/fairness>
<https://doi.org/10.33369/joall.v8i1.20968>

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS KALURAHAN DENGAN IDM PREDIKAT MANDIRI DI KABUPATEN SLEMAN)

¹Vidya Vitta Adhivinna ²Raafi Astrian Yudhistira ³Ratna Purnama Sari ⁴Rahandhika Ivan Adyaksana
^{1,2,3,4}Accounting Program, PGRI Yogyakarta University

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 03 April 2024
Revised: 03 April 2024
Accepted: 03 April 2024

Keywords:

Transparency,
Village Apparatus Competence,
Village Fund Management
Accountability

This study aims to test and obtain empirical evidence of the positive effect of transparency, the quality of village apparatus on the accountability of village fund management. This study uses primary data in the form of a survey by distributing questionnaires directly to 44 villages that received IDM with 352 respondents. The sampling technique used was purposive sampling technique with criteria based on Permendagri No. 20 of 2018. The data testing method is descriptive statistical test, data quality test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that transparency, the quality of village officials, and the government's internal control system have a significant effect on the accountability of village fund management.

Correspondence:

Vidya Vitta Adhivinna
Accounting Program, PGRI Yogyakarta,
University, Indonesia
adhvinna@upy.ac.id



©Vidya Vitta Adhivinna, Raafi Astrian Yudhistira, Ratna Purnama Sari, Rahandhika Ivan Adyaksana

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) 4.0 international license.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan struktur pemerintah paling bawah yang perlu adanya pembaharuan melalui pembangunan demi kesetaraan penduduk atau masyarakat. Maka dari itu, peran desa sangat penting dalam proses mencapai keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan secara luas (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Dana desa bermula dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah dan mengucur ke kas desa lewat dua cara manifestasi, meliputi pemindahan dana ke daerah secara berjenjang dan pemindahan dana melewati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kabupaten oleh pemerintah yang ditempatkan 10% untuk dialirkan ke kas desa dengan cara berjenjang (Adhivinna & Damayanti, 2022). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa (Fadhil et al., 2020).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat (Polutu et al., 2022). Faktor penting dalam pengelolaan dana desa yaitu transparansi. Transparansi dikatakan penting agar aparat desa bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum serta etika yang berlaku, juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2009).

Faktor lain untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Kompetensi Aparatur desa. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, kompetensi merupakan kapabilitas atau kemampuan dari seseorang berdasarkan ilmu, keterampilan, keahlian, sikap kerja, pengetahuan menurut kriteria jabatan yang diberikan kepadanya. Kompetensi perangkat didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik perangkat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut agar perangkat menjalankan semua fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal, profesional dan efektif.

Selain transparansi dan juga kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal merupakan faktor penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam organisasi, pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur yang bertujuan untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi (Hasanah et al., 2020). Mulyadi (2017:129) menjelaskan Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan.

Tabel.1

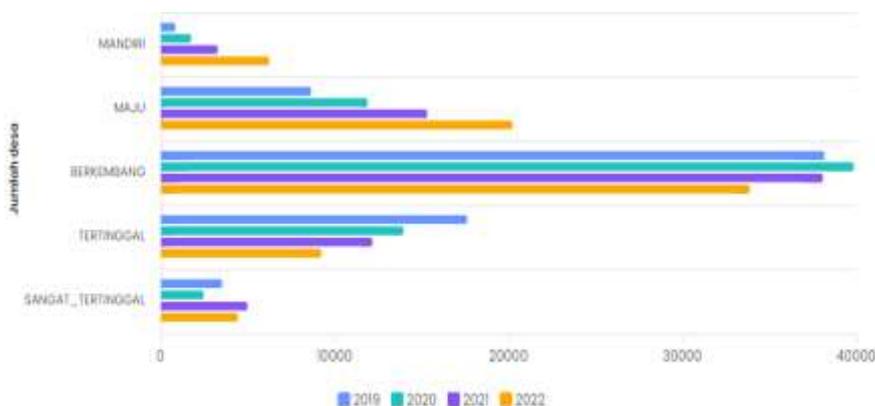
Alokasi dan realisasi anggaran dana desa pada tahun 2020 - 2022

Tahun	PAGU (triliun)	Realisasi (triliun)	Jumlah Desa
2020	71,19	59,12	74.953 desa
2021	72,00	71,85	74.939 desa
2022	68,00	55,44	74.961 desa

(sumber : <https://djpb.kemenkeu.go.id/>)

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran untuk anggaran dana desa setiap tahunnya mengeluarkan biaya yang besar setiap tahunnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga untuk mewujudkan program pembangunan pada desa-desa di Indonesia. Pemerintah membuat beberapa langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Salah satu progamnya adalah melalui program pembangunan desa. Untuk pelaksanaan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skor berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). IDM Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kompetensi hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155. Sedangkan, Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.

Gambar 1
Status IDM tahun 2019 – 2022)

(sumber : idm.kemendes.go.id)

Berdasarkan data diatas klasifikasi desa mandiri dan maju mengalami peningkatan yang cukup pesat. Status kemajuan dan kemandirian dari suatu desa dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan intervensi dalam anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Pada tahun 2022 desa mandiri mengalami peningkatan sebesar 0,0403 yang mana pada tahun 2021 desa mandiri terdiri dari 3.278 desa dan pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat hampir mencapai dua kali lipat yaitu sebanyak 6.239 yang terklasifikasi dengan desa mandiri. Peningkatan klasifikasi desa mandiri yang pesat juga sudah berhasil dilakukan oleh Kabupaten Sleman, yang mana pada tahun 2022 desa yang mendapatkan klasifikasi mandiri di Kabupaten Sleman sebanyak 44 desa dari 86 desa.

Meningkatnya klasifikasi mandiri pada desa di Kabupaten Sleman juga dikarenakan pengelolaan desa yang baik. Hal ini juga didukung oleh Prestasi yang didapat oleh kabupaten sleman yang berhasil meraih penghargaan atas kinerja tercepat penyaluran Dana Desa Tahun 2021 dari Kementrian Keuangan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jum'at (3/12/2021). Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Yogyakarta, Arif Wibawa kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo (Mediacenter.slemankab.go.id, 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya tidak selamanya pengelolaan dana desa berjalan dengan baik. Beberapa penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Sleman, yang pertama ada desa Banyurejo kecamatan tempel. Kasus penyalahgunaan dana desa tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp633 juta, akibat korupsi yang dilakukan oleh RS pada tahun 2015-2016 (sumber : kejadi-sleman.go.id). Kasus penyelewengan dana desa yang kedua dilakukan oleh Kepala Desa Purwomartani kecamatan Kalasan Sleman H. Tugiran, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp82 juta dan telah dilakukan eksekusi pidana badan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahun 2014 dengan cara dimasukkan ke Lapas Kelas IIA Yogyakarta untuk menjalani pidana penjara selama satu tahun (Sumber : kejadi-sleman.go.id

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan beberapa dampak akibat proses pengelolaan keuangan desa. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu : transparansi keuangan dana desa, kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pemerintah yang terdapat dilingkungan pemerintahan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency theory yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan hubungan kontraktual dua pihak antara principal dan agent, pihak principal yang dimaksud merupakan pihak pemilik perusahaan sedangkan pihak agent sebagai pihak pengelola perusahaan atau manajemen. Hubungan principal dan agent masing-masing memiliki tujuan berbeda yang akan menimbulkan konflik keagenan.

Organisasi sektor publik yang dimaksud principals sebagai rakyat dan agents adalah pemerintah, yang dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat lainnya. Dalam teori ini pemerintah atau agen dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Teori keagenan mengacu asas akuntabilitas sebab akuntabilitas adalah suatu wujud dari tanggung jawab perangkat dasar sebagai agen masyarakat desa di dalam penyelenggaraan pengelolaan

pemerintahan dan keuangan desa (Aprilya & Fitria, 2020).

Pengembangan Hipotesis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Pasal 4 ayat 7 No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan merupakan prinsip keterbukaan yang mana masyarakat seharusnya akan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah dan yang memungkinkan masyarakat dan mengetahui terkait informasi tersebut. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu kebijakan, proses pembuatan maupun pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai. Transparansi adalah bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi transparansi maka semakin efektif pengelolaan dana desa. Ini didukung dengan penelitian Ridha Fajri, Restu Agusti, (2021) yang menyatakan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

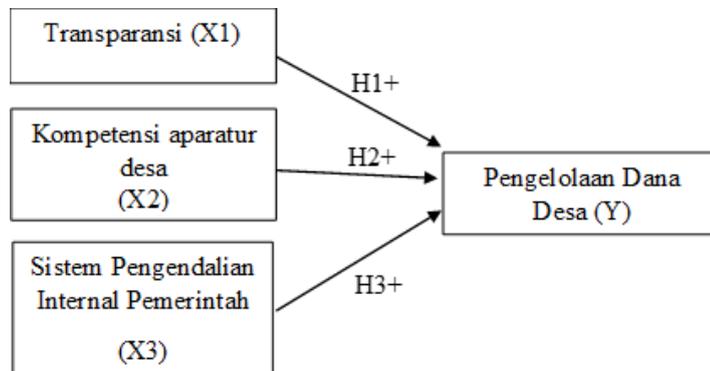
Kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik dapat diwujudkan dengan kompetensi sumber daya manusia yang bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat dan juga dapat dipercaya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting dan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena keterlibatan sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Basri et al., (2020) yang menyatakan bahwa Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

PP No 60 Th 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. serta memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adhivinna et al., 2022), yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Gambar.2
Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner dalam penelitian ini disebarkan kepada responden yang termasuk dalam kriteria penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur di Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sleman dengan IDM mandiri. Populasi dalam penelitian ini adalah 44 Desa Se-Kabupaten Sleman dengan IDM mandiri.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Alfaruqi et al., (2019) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti dengan kriteria. Skala pengukuran yang digunakan adalah dengan skala likert.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner dapat dikatakan tidak valid ketika nilai r dihitung $> r$ tabel. Selain itu, valid atau tidaknya kuesioner dapat dilihat dari hasil signifikansi yang menunjukkan korelasi masing-masing pertanyaan skor total P value sebesar $<0,05$ atau 5% (Ghozali, 2018).

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal, apabila jawaban responden terhadap pernyataan dapat konsisten dari waktu ke waktu. Pertanyaan dapat dikatakan reliabel ketika nilai Cronbach's Alpha $> r$ tabel. Sementara itu, kuesioner dapat dikatakan reliabel ketika nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2018)

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alat bantu yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Rumus yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y= Akuntabilitas Dana Desa

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Transparansi

β_2 = Koefisien regresi kompetensi aparatur desa

β_3 = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X1= Transparansi

X2= Kompetensi aparatur desa

X3= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

e = error

Nilai adjust (R²) berfungsi sebagai alat ukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel independen. Nilai yang mencakup koefisien determinasi antara nol dan satu. Artinya, ketika nilai R² menghasilkan nilai kecil maka variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya terbatas saja. Namun, ketika nilai R² mendekati angka satu berarti bahwa variabel independen menggambarkan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji F digunakan untuk mengetahui seluruh variabel independen dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi menunjukkan angka kurang dari 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018)

Uji statistik t berfungsi sebagai gambaran seberapa besar pengaruh satu variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel (Ghozali, 2018). Ketika nilai signifikansi menunjukkan angka < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dalam variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, ketika nilai signifikansi menunjukkan angka > 0,05 maka tidak terdapat signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai data primer dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden yang terdapat pada 44 desa di Kabupaten Sleman dengan IDM klasifikasi mandiri, kuesioner diberikan kepada masing-masing desa dengan responden yang merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal (3), menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari sebagai berikut : Kepala Desa, Sekretaris Desa, kaur keuangan desa, kaur tata usaha dan umum desa, Kaur perencanaan desa Kasi pemerintahan desa, Kasi pelayanan desa, dan Kasi kesejahteraan desa

Karakteristik responden memberikan gambaran mengenai sampel yang digunakan. Karakteristik responden pada penelitian ini dibagi menurut jenis kelamin, usia, Pendidikan, tingkat jabatan, dan lama bekerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
Usia	20 - 30 tahun	18	6,3%
	31 - 40 tahun	74	25,9%
	41 - 50 tahun	98	34,32%
	51 - 60 tahun	96	33,6%
	Total	286	100%
Jenis Kelamin	Laki-laki	231	80,8%
	Perempuan	55	19,2%
	Total	286	100%
Pendidikan Terakhir	SMA	73	25,5%
	Diploma	21	7,3%
	S1	187	65,4%
	S2	5	1,7%
	S3	0	0%
	Total	286	100%
Jabatan	Kepala Desa	31	10,8%
	Sekretaris Desa	35	12,2%
	Kaur Keuangan Desa	37	12,9%
	Kaur Tata Usaha dan Umum Desa	36	12,6%
	Kaur Perencanaan Desa	36	12,6%
	Kasi Pemerintah Desa	34	11,9%
	Kasi Pelayanan Desa	38	13,3%
	Kasi Kesejahtera desa	39	13,6%
	1 – 2 Tahun	19	6,6%
	3 – 4 Tahun	44	15,4%
Lama Bekerja	>5 Tahun	223	78%
	Total	169	100%

Sumber : data diolah, 2023

Hasil Uji Analisis Data

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Transparansi (X1)	286	18	30	26,0664	2,56134
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	286	18	30	26,3112	2,69587
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	286	35	55	47,9685	4,24294
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	286	67	85	76,3951	6,05540
Valid N (litwise)	286				

Sumber : data diolah, 2023

Tabel 3 menjelaskan bahwa variabel transparansi memiliki nilai dari hasil jawaban terkecil yaitu 18, nilai terbesarnya adalah 30, dan nilai rata-rata sebesar 26,0664 dengan standar deviasi 2,56134. Variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai dari hasil jawaban terkecil yaitu 18, nilai terbesarnya adalah 30, dan nilai rata-rata sebesar 26,3112 dengan standar deviasi 2,569587. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai dari hasil jawaban terkecil yaitu 35, nilai terbesarnya adalah 55, dan nilai rata-rata sebesar 47,9685 dengan standar deviasi 4,24294. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai dari hasil jawaban terkecil yaitu 67, nilai terbesarnya adalah 85, dan nilai rata-rata sebesar 76,3951 dengan standar deviasi 6,05540.

Uji validitas data digunakan untuk mengetahui tingkat valid atau sahnya suatu kuesioner. Data dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Menentukan r_{tabel} yaitu dengan menggunakan rumus ($df = n - 2$), jadi dalam penelitian ini dengan 286 sampel, maka $286 - 2 = 284$, yang mana df 286 dan α 0,05 sehingga didapatkan r_{tabel} 0,1160. Berikut ini adalah hasil uji validitas variabel transparansi, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Transparansi (X1)				
No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	.Sig.	Keterangan
1	0,766	0,1160	0,000	Valid
2	0,827	0,1160	0,000	
3	0,825	0,1160	0,000	
4	0,854	0,1160	0,000	
5	0,780	0,1160	0,000	
6	0,791	0,1160	0,000	

7	0,769	0,1160	0,000	
Kompetensi Aparatur Desa (X2)				
1	0,769	0,1160	0,000	Valid
2	0,788	0,1160	0,000	
3	0,837	0,1160	0,000	
4	0,862	0,1160	0,000	Valid
5	0,777	0,1160	0,000	
6	0,709	0,1160	0,000	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)				
1	0,704	0,1160	0,000	Valid
2	0,758	0,1160	0,000	
3	0,758	0,1160	0,000	
4	0,735	0,1160	0,000	
5	0,717	0,1160	0,000	
6	0,707	0,1160	0,000	
7	0,645	0,1160	0,000	
8	0,671	0,1160	0,000	
9	0,681	0,1160	0,000	
10	0,710	0,1160	0,000	
11	0,705	0,1160	0,000	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)				
1	0,598	0,1160	0,000	Valid
2	0,671	0,1160	0,000	
3	0,637	0,1160	0,000	
4	0,854	0,1160	0,000	
5	0,639	0,1160	0,000	
6	0,649	0,1160	0,000	
7	0,649	0,1160	0,000	
8	0,712	0,1160	0,000	
9	0,660	0,1160	0,000	
10	0,762	0,1160	0,000	
11	0,701	0,1160	0,000	
12	0,738	0,1160	0,000	
13	0,738	0,1160	0,000	
14	0,713	0,1160	0,000	
15	0,755	0,1160	0,000	
16	0,757	0,1160	0,000	
17	0,711	0,1160	0,000	

Sumber : data diolah, 2023

Reliabilitas adalah pengujian yang digunakan untuk menganalisis konsistensi dari butir – butir jawaban atas pertanyaan kuesioner. Uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach Alpha dan jika nilainya $> 0,70$ maka item pertanyaan dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. Hasil dari uji reliabilitas. Hasil Cronbach alpha dari variabel dependen dan independen memiliki nilai $> 0,70$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dan independent dinyatakan reliabel. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Transparansi (X1)	0,892	Nilai Cronbach's Alpha >0,70 maka dikatakan Reliabel	Reliabel
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0,880		Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	0,900		Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,932		Reliabel

Sumber : data diolah, 2023

Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan agar dapat mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah masing – masing variabel independen berhubungan positif maupun negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.Error		
Transparansi (X1)	0,464	0,139	3,351	0,001
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0,410	0,126	3,252	0,001
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	0,534	0,084	6,341	0,000
Konstanta	27,493			
Adjusted R	0,375			
F hitung	57,888			
Sig. F	0,000			
a. Variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa				

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 27,493 + 0,464X_1 + 0,410X_2 + 0,534X_3 + e$$

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X1 = Transparansi

X2 = Kompetensi Aparatur Desa

X3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan dengan penjelasan seperti berikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang di hasilkan yaitu sebesar 27,493 menyatakan bahwa tanpa ada

pengaruh dari ketiga variabel independen, maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai sebesar 27,493.

2. Koefisien Transparansi (β_1)

Nilai koefisien variabel transparansi yaitu sebesar 0,464 yang menunjukkan besarnya kontribusi variable transparansi (X1) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). hasil koefisien regresi positif dapat diartikan bahwa jika terjadi kenaikan variabel transparansi maka akan meningkatkan variable akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,464.

3. Koefisien Kompetensi Aparatur Desa (β_2)

Nilai koefisien variabel transparansi yaitu sebesar 0,410 yang menunjukkan besarnya kontribusi variable kompetensi aparatur desa (X2) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). hasil koefisien regresi positif dapat diartikan bahwa jika terjadi kenaikan variabel kompetensi aparatur desa maka akan meningkatkan variable akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,410.

4. Koefisien Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (β_3)

Nilai koefisien variabel system pengendalian internal pemerintah yaitu sebesar 0,534 yang menunjukkan besarnya kontribusi variable transparansi (X3) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). hasil koefisien regresi positif dapat diartikan bahwa jika terjadi kenaikan variabel system pengendalian internal pemerintah maka akan meningkatkan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,534.

Uji Hipotesis

Uji f digunakan untuk memperlihatkan apakah semua variabel independent yaitu transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal pemerintah yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh pada variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Uji F dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansinya $f < 0,05$ dan $> f$ table

Tabel 7
Hasil Uji f

Model	Sum of square	Df	Mean square
Regression	3839,110	3	1279,703
Residual	6234,013	282	22,106
Total	10073,122	285	

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 7 diketahui bahwa sebesar 57,888 dengan tingkat signifikansi f sebesar 0,000. Maka akan didapatkan hasil $> 2,64$ dan nilai signifikansi $f < 0,05$. Sehingga didapat kesimpulan bahwa variabel independen yaitu transparansi, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji t ditujukan untuk menguji secara parsial variabel independen yaitu transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari nilai signifikansi

hasil output pada SPSS, dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai sig. < 0,05 maka variabel independen yaitu transparansi, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa tetapi apabila nilai sig. > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji T

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
Transparansi (X1)	0,464	0,139	3,351	0,001
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0,410	0,126	3,252	0,001
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	0,534	0,084	6,341	0,000
Konstanta	27,493			
Adjusted R	0,375			
F hitung	57,888			
Sig. F	0,000			
a. Variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa				

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8, maka uji t dapat dijelaskan seperti berikut ini :

Variabel Transparansi (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yaitu kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan $0,001 < 0,05$ dan nilai beta pada *Unstandardized coefficients* adalah 0,464 yang mengindikasikan ke arah positif. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang artinya H0 tidak didukung dan H1 diterima.

Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yaitu kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan $0,001 < 0,05$ dan nilai beta pada *Unstandardized coefficients* adalah 0,410 yang mengindikasikan ke arah positif. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang artinya H0 tidak didukung dan H1 diterima.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan $0,000 < 0,05$ dan nilai beta pada *Unstandardized Coefficients* yaitu 0,534 yang mengindikasikan ke arah positif. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang berarti H0 tidak didukung dan H1 diterima.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan kemampuan variabel terkait, sedangkan sisanya dijelaskan dengan sebab – sebab lain di luar model.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,617 ^a	0,381	0,375	4,70175

Berdasarkan tabel 9 maka dapat diketahui jika koefisien determinasi sebesar 0,375 yang berarti variabel independent yaitu transparansi, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal pemerintah memiliki kontribusi sebesar 37,50% terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sisanya sebesar 62,50% dipengaruhi oleh faktor lain

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

1. Tidak semua kalurahan bersedia untuk menerima dan tidak semua aparatur desa bersedia mengisi kuesioner penelitian skripsi, dan jika bersedia waktu untuk pengambilan kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Hasil pada koefisien determinasi hanya 37,50%. Hal ini menunjukkan bahwa tiga variabel yaitu transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya berpengaruh.
3. Pada karakteristik responden berdasarkan lama bekerja bagian jangka waktu terlalu pendek yaitu selang satu tahun sehingga menghasilkan frekuensi lama bekerja yang kurang spesifik.

Saran

1. Melakukan pengecekan kuesioner secara berkala, baik melalui komunikasi atau datang langsung ke kalurahan, sehingga tingkat pengembalian kuesioner lebih maksimal, agar dapat memperkuat data yang akan diolah. Dan diharapkan

- peneliti selanjutnya dapat mendampingi pengisian kuesioner secara langsung kepada responden agar hasil yang didapat lebih baik.
2. Menambahkan variabel independen lebih banyak agar dapat memperkuat pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau mengganti variabel independent dengan variabel kepatuhan undang – undang. Pemilihan variabel ini dilihat pada hasil uji t (parsial) pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Audia & Mulyani, 2023). Nilai t sebesar 9,951, dengan nilai t yang cukup besar diharapkan variabel kepatuhan undang – undang dapat menjadi salah satu variabel independent yang memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen sehingga akan menghasilkan nilai *Adjusted R* diatas 50%.
 3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperlebar jangka waktu lama bekerja agar hasil frekuensi lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., & Damayanti, N. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(1), 113–133.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- Fadhil, I., Ismail, N., & Kiflan, A. (2020). *Universitas Abulyatama Jurnal Aceh Medika Kendala Optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk*. 4(1), 43–51.
- Ghozali. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. In *Accountability* (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.32400/Ja.16023.6.1.2017.18-27>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.18196/Rab.040149>
- Jensen, & Meckling. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. In *Orphanet Journal Of Rare Diseases* (Vol. 21, Issue 1).
- Mediacenter.Slemankab.Go.Id. (2021). *Pemkab Sleman Salurkan Dana Desa Tercepat Se-Diy*.

<https://Mediacenter.Slemankab.Go.Id/2021/12/03/Pemkab-Sleman-Salurkan-Dana-Desa-Tercepat-Se-Diy/>

- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/Jak.V8i1.2379>
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/Jar.V3i2.53>
- Ridha Fajri, Restu Agusti, J. (2021). *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 17(2), 209–227.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan Umkm*, 2(1), 52–66.